



# Laporan Keuangan

**BALAI KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**

2024



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai KIPM Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai KIPM Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Ambon, 6 Mei 2025  
Kepala,

Muhammad Hatta Arisasndi, S.St.Pi.,M.Si  
NIP 19800527200312 1 001

DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	32



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA WAIHERU - AMBON 97232

TELEPON : (0911) 3869137 : FAKSIMILE : (0911) 361991

LAMAN: www.bkipm.kkp.go.id : POS ELEKTRONIK : ambon@bkipm.kkp.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Ambon, 13 Januari 2025  
Kepala,

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si  
NIP 198005272003121001

Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.110.790.000 atau mencapai 123,1% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 90.000.000.

Realisasi Belanja Negara (neto) Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.347.108.143 atau mencapai 99.08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.396.566.000

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 17.442.492.075 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.147.351.960; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.17.295.140.115; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban Rp.19.452.531 dan Ekuitas Rp.17.423.039.544.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 110.790.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar (Rp.649.925.309) sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.5.539.135.309. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan sebesar Rp.5.539.135.309 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.5.539.135.309



**4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.19.193.235.941 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(5.539.135.309) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(3.437.500), koreksi nilai aset non revaluasi Rp.(3.437.500), nilai lain-lain Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.3.772.376.412 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.17.423.039.544.

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KIPM AMBON**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	90,000,000	110,790,000	123.10	160,000,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>90,000,000</b>	<b>110,790,000</b>	<b>123.10</b>	<b>160,000,000</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	2,554,278,000	2,543,454,381	99.58	4,378,106,000
Belanja Barang	B.4	2,842,288,000	2,803,653,762	98.64	4,131,018,000
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	602,900,000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5,396,566,000</b>	<b>5,347,108,143</b>	<b>99.08</b>	<b>9,112,024,000</b>

bkipm ambon



II. NERACA

**BALAI KIPM AMBON**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Belanja dibayar dimuka	C.1	-	-
Piutang bukan pajak	C.2	-	-
Penyisihan piutang tidak tertagih-piutang bukan pajak	C.3	-	-
Piutang bukan pajak (Netto)	C.4	-	-
Persediaan	C.5	147,351,960	21,787,960
Jumlah Aset Lancar		147,351,960	21,787,960
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.3	2,292,879,000	3,018,281,000
Peralatan dan Mesin	C.4	8,480,260,510	10,202,707,685
Gedung dan Bangunan	C.5	17,996,743,355	18,648,264,355
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	106,307,000	106,307,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.7	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(11,581,049,750)	(12,780,077,714)
Jumlah Aset Tetap		17,295,140,115	19,195,482,326
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Lain-Lain	C.9	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>17,442,492,075</b>	<b>19,217,270,286</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	19,452,531	24,034,345
Hibah yang belum disahkan	C.12	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19,452,531	24,034,345
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>19,452,531</b>	<b>24,034,345</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.13	17,423,039,544	19,193,235,941
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>17,423,039,544</b>	<b>19,193,235,941</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>17,442,492,075</b>	<b>19,217,270,286</b>



III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KIPM AMBON**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	110,790,000	138,935,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>110,790,000</b>	<b>138,935,000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2,543,454,381	4,366,179,387
Beban Persediaan	D.3	96,460,432	407,527,539
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,410,175,421	2,011,568,556
Beban Pemeliharaan	D.5	568,215,799	842,482,084
Beban Perjalanan Dinas	D.6	601,230,546	903,665,645
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	430,388,730	969,050,349
Penyisihan piutang tidak tertagih	D.8	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>(5,649,925,309)</b>	<b>(9,500,473,560)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>5,760,715,309</b>	<b>9,639,408,560</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.8		
Pendapatan Aset Non Lancar		-	37,860,500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>37,860,500</b>
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
<b>Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>37,860,500</b>
<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>5,539,135,309</b>	<b>9,323,678,060</b>
Pos Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.9		
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>5,539,135,309</b>	<b>9,323,678,060</b>



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI KIPM AMBON  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	19,193,235,941	19,605,462,931
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5,539,135,309)	(9,323,678,060)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3,437,500)	8,247,773
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.4	(3,437,500)	8,248,773
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3,772,376,412	8,903,202,297
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(1,770,196,397)	(412,226,990)
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>17,423,039,544</b>	<b>19,193,235,941</b>

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Ambon**

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Balai KIPM Ambon merupakan pemegang otoritas kompeten di Sangihe dalam mendeteksi dan melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPI/HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Berkedudukan di Kompleks Pelabuhan Laut Tahuna, Balai KIPM Ambon mempunyai tugas “Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan berbahaya serta sebagai instrument teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan”. Dalam melaksanakan tugasnya Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Melakukan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- Melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- Melaksanakan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- Melakukan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melakukan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Menerapkan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas Balai KIPM Ambon berkomitmen dengan visi “*Mewujudkan hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya.*”

- Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Balai KIPM Ambon adalah “*Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan* **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

*Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi* **A.3. Basis Akuntansi**

*Basis Akuntansi*

Balai KIPM Ambon menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA* (1) **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu



dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-* **(2) Pendapatan- LO**

*LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan



selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset (5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:



Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*    **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.



- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan* **c. Penyusutan Aset Tetap**  
*Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku



yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*      **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*      **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**Implementasi (8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Balai KIPM Ambon belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal tetapi telah mengadakan revisi POK. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	90,000,000	90,000,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	4,370,260,000	2,554,278,000
Belanja Barang	4,143,275,000	2,842,288,000
Belanja Modal	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8,513,535,000</b>	<b>5,396,566,000</b>

Realisasi

**B.1 Pendapatan**

Pendapatan  
Rp.110.790.  
000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.110.790.500, Pendapatan Balai KIPM Ambon terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya sebesar Rp.107.995.000, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp.2.795.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:



Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	(dalam rupiah)		
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan	0	0	0
Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin	0	37,860,500	(37,860,500)
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya	107,995,000	135,835,000	(27,840,000)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
Pendapatan jasa karantina	2,795,000	3,100,000	(305,000)
<b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b>	<b>110,790,000</b>	<b>176,795,500</b>	<b>(66,005,500)</b>

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan fungsional Balai KIPM Ambon Tahun 2024 sebesar Rp.110.790.000- atau 123,1 persen dari estimasi pendapatan 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp.90.000.000,- dimana sebagian besar merupakan pendapatan jasa karantina perikanan (425332) yaitu sebesar Rp.2.795.000,- dan Pendapatan pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (425289) sebesar Rp.107.995.000,-

Realisasi **B.2 Belanja**

Belanja

Negara

Rp.5.347.

108.143

Laporan realisasi belanja bruto Balai KIPM Ambon tahun 2024 berdasarkan jenis belanja adalah sebesar **Rp.5.347.108.143,-** yang terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp.2.543.454.381,-**, belanja barang sebesar **Rp.2.803.653.762,-**, dan belanja modal sebesar **Rp.0**.

Realisasi belanja tahun 2023 senilai Rp.9.073.857.797 sehingga Total penurunan realisasi bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar **Rp.3.726.749.654,-** yang terdiri atas penurunan pada belanja pegawai sebesar



**Rp.1.822.725.006,-** (41.75%) penurunan dikarenakan oleh perpindahan pegawai pada Badan Karantina Indonesia, penurunan pada belanja barang sebesar **Rp.1.301.338.248 (31.70%)** penurunan dikarenakan revisi anggaran yang dipindahkan pada Badan Karantina Indonesia dan pada belanja modal penurunan sebesar **Rp.673.395.937 (100%)** penurunan dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat belanja anggaran belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



*Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,543,454,381	4,366,179,387	(41.75)
Belanja Barang	2,803,653,762	4,104,992,010	(31.70)
Belanja Modal	-	602,686,400	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>5,347,108,143</b>	<b>9,073,857,797</b>	<b>(41.07)</b>



Belanja **B.3 Belanja Pegawai**

Pegawai  
Rp.2.543.  
454.381,-

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.543.454.381,-. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di TA.2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp.1.822.725.006,-. mengingat realisasi belanja pegawai pada TA 2023 sebesar Rp.4.366.179.387,-. penurunan belanja pegawai pada TA.2024 disebabkan oleh adanya perpindahan pegawai pada Badan Karantina Indonesia.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI DESEMBER 2024	REALISASI DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan PNS</b>	<b>980,120,760</b>	<b>1,920,366,890</b>	
Belanja Gaji pokok PNS	681,277,500	1,324,968,160	(48.58)
Pembulatan gaji PNS	10,438	19,496	(46.46)
Tunjangan suami/istri PNS	54,756,600	97,420,270	(43.79)
Tunjangan anak PNS	21,413,948	33,105,906	(35.32)
Tunjangan struktural PNS	33,840,000	38,160,000	(11.32)
Tunjangan fungsional PNS	33,945,000	89,835,000	(62.21)
Tunjangan PPh PNS	4,548,414	2,064,838	120.28
Tunjangan beras PNS	45,841,860	86,252,220	(46.85)
Tunjangan uang makan PNS	96,787,000	235,846,000	(58.96)
Tunjangan umum PNS	7,700,000	12,695,000	(39.35)
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK</b>	<b>148,216,450</b>	-	
Belanja Gaji pokok PPPK	111,192,000	-	
Pembulatan gaji PPPK	2,312	-	
Tunjangan suami/istri PPPK	7,274,880	-	
Tunjangan anak PPPK	2,141,088	-	
Tunjangan beras PPPK	6,952,320	-	
Tunjangan uang makan PPPK	20,653,850	-	
<b>Belanja lembur</b>	<b>380,859,000</b>	<b>556,842,000</b>	(31.60)



- Belanja uang makan lembur	334,936,000	556,842,000	(39.85)
- Belanja uang makan lembur PPPK	45,923,000	-	-
<b>Belanja Tunjangan Khusus</b>	<b>1,034,258,171</b>	<b>1,888,970,511</b>	<b>(45.25)</b>
-Belanja pegawai (Tunjangan Khusus)	894,356,847	1,888,970,511	(52.65)
-Belanja pegawai (Tunjangan Khusus) PPPK	139,901,324	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,543,454,381</b>	<b>4,366,179,401</b>	<b>(41.75)</b>

Belanja  
Barang  
Rp.2.80  
3.653,-

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.803.653.762,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada tahun lalu, maka terjadi penurunan sebesar Rp.1.301.338.248 atau 31.70% mengingat realisasi tahun lalu sebesar Rp.4.104.992.010, penurunan realisasi belanja barang salah satunya disebabkan karena adanya revisi anggaran yang dialihkan ke Badan Karantina Indonesia.

**Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan  
2023**



URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
<b>Belanja Barang Operasional</b>	<b>773,212,222</b>	<b>1,166,787,386</b>	(33.73)
- Belanja keperluan perkantoran	611,533,732	911,445,340	(32.91)
- Belanja penambah daya tahan tubuh	19,074,200	30,800,000	(38.07)
- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	2,201,300	7,198,783	(69.42)
- Belanja honor operasional satuan kerja	91,608,000	138,528,000	(33.87)
- Belanja operasional lainnya	48,794,990	78,815,263	(38.09)
- Belanja operasional penanganan covid-19			
<b>Belanja Barang Non Operasional</b>	<b>34,920,000</b>	<b>424,298,500</b>	(91.77)
- Belanja bahan	23,671,500	382,135,000	(93.81)
- Belanja honor output kegiatan	8,160,000	8,160,000	-
- Belanja barang non operasional lainnya	3,088,500	8,153,500	(62.12)
- Belanja peralatan dan mesin ekstrakontabel	-	1,500,000	(100.00)
- Belanja gedung dan bangunan ekstrakontabel	-	24,350,000	(100.00)
<b>Belanja barang persediaan</b>	<b>239,319,886</b>	<b>447,612,914</b>	(46.53)
- Belanja persediaan barang konsumsi	82,663,686	217,381,914	(61.97)
- Belanja barang persediaan bahan baku	156,656,200	230,231,000	(31.96)
<b>Belanja Jasa</b>	<b>606,625,013</b>	<b>417,981,845</b>	45.13
- Belanja langganan listrik	217,606,692	246,758,888	(11.81)
- Belanja langganan telepon	25,124,022	13,264,807	89.40
- Belanja langganan air	14,662,525	10,562,800	38.81
- Belanja langganan daya dan jasa lainnya			
- Belanja sewa	7,300,000	43,750,000	(83.31)
- Belanja jasa profesi		26,800,000	100.00
- Belanja jasa lainnya	341,931,774	76,845,350	344.96
- Belanja jasa penanganan pandemi covid-19			
<b>Belanja pemeliharaan</b>	<b>548,346,095</b>	<b>744,645,720</b>	(26.36)
- Belanja pemeliharaan gedung	367,252,500	499,009,150	(26.40)
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	181,093,595	245,636,570	(26.28)
<b>Belanja perjalanan dalam negeri</b>	<b>601,230,546</b>	<b>903,665,645</b>	(33.47)
- Belanja perjalanan biasa	585,080,546	618,801,311	(5.45)
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	16,150,000	54,864,000	(70.56)
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	-	230,000,334	(100.00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,803,653,762</b>	<b>4,104,992,010</b>	(31.70)



Belanja Modal  
Rp.0-

**B.5 Belanja Modal**

Penyerapan realisasi belanja modal tahun 2024 adalah sebesar Rp.0,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp.602.686.400 atau turun 100% mengingat realisasi belanja modal tahun lalu hanya sebesar Rp.602.686.400, hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 tidak terdapat pagu anggaran belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>0</b>	<b>327,443,400</b>	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		327,443,400	(100.00)
<b>Belanja Modal Jaringan, Irigasi, Jaringan</b>	<b>0</b>	<b>26,593,000</b>	(100.00)
Belanja Modal Jaringan		26,593,000	
Penambahan nilai gedung dan bangunan	0	0	0.00
<b>Belanja Modal Perlatan dan Mesin</b>	<b>0</b>	<b>183,950,000</b>	(100.00)
Belanja Modal Perlatan dan Mesin		183,950,000	(100.00)
<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>0</b>	<b>64,700,000</b>	(100.00)
Belanja Pengurukan dan Pematangan Tanah		64,700,000	(100.00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>602,686,400</b>	(100.00)

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

**A. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**

Komposisi Neraca Balai KIPM Ambon tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Aset	17,442,492,075	19,663,360,179	(2,220,868,104)
Kewajiban	19,452,531	24,034,345	(4,581,814)
Ekuitas	17,423,039,544	19,639,325,834	(2,216,286,290)

Jumlah Aset Balai KIPM Ambon tahun 2024 sebesar **Rp.17.442.492.075,-**. Apabila dibandingkan dengan jumlah aset tahun lalu maka terdapat penurunan sebesar Rp.2.220.868.104,- mengingat posisi aset pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.19.663.360.179**, penurunan tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya



pengalihan aset BMN ke Badan Karantina Indonesia.

Jumlah Aset diatas terdiri dari:

1. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.147.351.960,-** Apabila aset lancar tersebut dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 maka terdapat kenaikan sebesar **Rp.125.564.000,-** (576.30%) mengingat posisi 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.21.787.960,-** hal ini disebabkan oleh adanya persediaan bahan uji laboratorium yang masih tersedia.
2. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.17.295.140.115,-** Apabila aset tetap tersebut dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023, maka terdapat penurunan sebesar (Rp.1.900.342.211),- (9.90%) mengingat posisi aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.19.195.482.326,-** hal ini disebabkan oleh adanya peralihan aset BMN ke Badan Karantina Indonesia.
3. Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.0,-**. Tidak terdapat Piutang Jangka Panjang pada Balai KIPM Ambon, baik TA. 2024 maupun TA. 2023.
4. Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.0,-**. Tidak terdapat aset lainnya pada Balai KIPM Ambon baik Taun 2024 maupun 2023.
5. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2024 Balai KIPM Ambon sebesar **Rp.19.452.531,-** yang merupakan kewajiban jangka pendek. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023, maka terdapat penurunan sebesar (Rp.4.581.814),- (19,06%) mengingat posisi kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.24.034.345,-**. penurunan disebabkan oleh turunnya belanja langganan listrik, telepon dan internet.
6. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 Balai KIPM Ambon sebesar **Rp.17.423.039.544,-** Apabila dibandingkan dengan posisi ekuitas per 31 Desember 2023 maka terdapat penurunan sebesar (Rp.1.770.196.397),- (9.22%) mengingat posisi ekuitas dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. Rp.19.193.235.941,-**.



**C.2. ASET LANCAR**

Nilai Aset Lancar Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.147.351.960,-** dan **Rp.21.787.960,-**

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Balai KIPM Ambon Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 12

**Tabel 12** : Laporan Neraca Balai KIPM Ambon Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Aset Lancar	31 Des 2024	31 Des 2023	Naik/Turun
1	Belanja dibayar dimuka	-	-	-
2	Penyisihan piutang tidak tertagih	-	-	-
3	Piutang bukan pajak	-	-	-
4	Persediaan	147,351,960	21,787,960	125,564,000
	<b>Jumlah</b>	<b>147,351,960</b>	<b>21,787,960</b>	<b>125,564,000</b>

Kas Bendahara Pengeluaran Rp.0

**C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp.0,- dan Rp.0**

Kas Bendahara Penerimaan Rp.0,-

**C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

Persediaan Rp.147.351.960

**C.1.3. Persediaan**

Persediaan merupakan jenis aset yang di bawah nilai kapitalisasi atau barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca dilaporkan tidak lebih dari satu tahun, persediaan tersebut diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Jumlah Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.147.351.960- sementara nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.21.787.960,-. Posisi persediaan pada Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 13 : Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan	147,351,960	21,787,960	125,564,000
<b>Jumlah</b>	<b>147,351,960</b>	<b>21,787,960</b>	<b>125,564,000</b>

Tabel 14 : Uraian Persediaan

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	21,554,960	(2,232,400)	19,322,560
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	233,000	(50,800)	182,200
117114	Suku Cadang	-	-	-
117121	Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
117131	Bahan Baku	-	127,847,200	127,847,200
<b>TOTAL</b>		<b>21,787,960</b>	<b>125,564,000</b>	<b>147,351,960</b>

bkipm ambon



**KEWAJIBAN**

**C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

**C.5.1 Uang Muka dari KPPN**

Merupakan kontra pos dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang pada tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan secara definitif.

Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

**Tabel 23** : Uang Muka dari KPPN

Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Jumlah	0	0	0

**C.5.2 Utang Pada Pihak Ke Tiga**

Utang pada pihak ke tiga merupakan sistem akuntansi secara akrual dimana pencatatan ini di khususkan terkait utang yang belum dibayarkan pada pihak ke tiga pada akhir neraca seperti belanja daya dan jasa. Utang pada pihak ketiga ini sebagian besar merupakan Langganan Daya dan Jasa dan sisanya merupakan kontra pos dari kas lainnya di bendahara pengeluaran yang masih terdapat dalam rekening rekening bendahara pengeluaran dimana pada tanggal neraca belum diberikan kepada pihak ketiga.

Saldo utang pada pihak ketiga Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.19.452.531,- yang terdiri dari tagihan listrik bulan Desember sebesar Rp.16.411.026, telepon sebesar Rp.153.180,- dan internet sebesar Rp.1.742.700 dan Langganan Air Rp.1.145.625,- sementara saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 24.034.345,-. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp.4.581.814 (19.06%). Perbandingan Saldo Utang pada pihak ketiga disajikan pada



table berikut ini:

**Tabel 24** : Utang Pada Pihak Ke Tiga  
Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Utang pada Pihak Ke Tiga	19,452,531	24,034,345	(4,581,814)
<b>Jumlah</b>	<b>19,452,531</b>	<b>24,034,345</b>	<b>(4,581,814)</b>

## C. EKUITAS

### C.1. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.17.423.039.544,- sementara ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.19.193.235.941,-

**Tabel 26** : Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas	17,423,039,544	19,639,325,834	(2,216,286,290)
<b>Jumlah</b>	<b>17,423,039,544</b>	<b>19,639,325,834</b>	<b>(2,216,286,290)</b>

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan PNPB

Saldo pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.110.790.000,- dan Rp.176.795.500,- Pendapatan PNPB tersebut berasal dari pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan dan Pendapatan Perikanan.



**Tabel 26 :** Pendapatan PNBP Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan PNBP	110,790,000	176,795,500	(66,005,500)
<b>Jumlah</b>	<b>110,790,000</b>	<b>176,795,500</b>	<b>(66,005,500)</b>

#### D.2. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Untuk tahun 2024 beban pegawai Balai KIPM Ambon pada Laporan Operasional sebesar Rp.2.543.454.381,- Sementara beban pegawai untuk periode yang sama TA 2024 sebesar Rp.4.366.179.387,-

**Tabel 28:** Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Pegawai	2,543,454,381	4,366,179,387	(1,822,725,006)
<b>Jumlah</b>	<b>2,543,454,381</b>	<b>4,366,179,387</b>	<b>(1,822,725,006)</b>

#### D.3. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang habis pakai. Beban persediaan tahun 2024 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.96.460.432,-. Sementara beban persediaan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp.407.527.539.



**Tabel 29:** Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Persediaan	96,460,432	407,527,539	(311,067,107)
<b>Jumlah</b>	<b>96,460,432</b>	<b>407,527,539</b>	<b>(311,067,107)</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2024 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.1.410.175.421,-. Sementara beban jasa pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp.2.011.568.556,-

**Tabel 30:** Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Barang dan Jasa	1,410,175,421	2,011,568,556	(601,393,135)
<b>Jumlah</b>	<b>1,410,175,421</b>	<b>2,011,568,556</b>	<b>(601,393,135)</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2024 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.568.215.799,-. Sementara beban pemeliharaan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp.842.482.084,-

**Tabel 31:** Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Pemeliharaan	568,215,799	842,482,084	(274,266,285)
<b>Jumlah</b>	<b>568,215,799</b>	<b>842,482,084</b>	<b>(274,266,285)</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tahun 2024 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.601.230.546,-. Sementara beban perjalanan dinas pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp.903.665.645,-.



**Tabel 32:** Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Perjalanan Dinas	601,230,546	903,665,645	(302,435,099)
<b>Jumlah</b>	<b>601,230,546</b>	<b>903,665,645</b>	<b>(302,435,099)</b>

**D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.430.388.730,-. Sementara beban penyusutan dan amortisasi pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp.969.050.349.

**Tabel 33:** Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	430,388,730	969,050,349	(538,661,619)
<b>Jumlah</b>	<b>430,388,730</b>	<b>969,050,349</b>	<b>(538,661,619)</b>

**D.8. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus / defisit dari kegiatan non operasional Tahun TA. 2024 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.,- Sementara Surplus / defisit dari kegiatan non operasional Tahun TA. 2023 sebesar Rp.37.860.500,-



**Tabel 34:** Surplus / defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Surplus / defisit dari kegiatan non operasional	37,860,500	(1,212,068,708)	1,249,929,208
<b>Jumlah</b>	<b>37,860,500</b>	<b>(1,212,068,708)</b>	<b>1,249,929,208</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19.193.235.941,- sementara nilai ekuitas awal pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.605.462.931,-

**Tabel 35:** Ekuitas awal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas awal	19,193,235,941	19,605,462,931	(412,226,990)
<b>Jumlah</b>	<b>19,193,235,941</b>	<b>19,605,462,931</b>	<b>(412,226,990)</b>

### E.2. Surplus (Defisit) LO

Nilai surplus/defisit LO Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.(5.539.135.309) dan Rp. (9.323.678.060,-)

**Tabel 35:** Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Surplus/Defisit-LO	5,539,135,309	9,323,678,060	(3,784,542,751)
<b>Jumlah</b>	<b>5,539,135,309</b>	<b>9,323,678,060</b>	<b>(3,784,542,751)</b>



### E.3. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.(3.437.500),- dan Rp.8.248.773.

### E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.(3.437.500) dan Rp.8.248.773.

### E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.17.423.039.544,- dan Rp.19.193.235.941,-

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas Akhir	17,423,039,544	19,193,235,941	(1,770,196,397)
Jumlah	17,423,039,544	19,193,235,941	(1,770,196,397)

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1. PENGUNGKAPAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal Neraca

### F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

#### F.2.1 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BALAI KIPM AMBON TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Laporan Keuangan Tahun 2024 tidak terdapat temuan Audit oleh BPK-RI.

#### F.2.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Balai KIPM Ambon tidak terdapat anggaran yang bersumber dana Hibah dan PLN.



2. Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon tahun 2024 berdasarkan hasil rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi dengan Sistem Akuntansi Umum Kemkeu yang disusun secara berjenjang.

#### G. Kegiatan Prioritas Nasional

Pada Balai KIPM Ambo terdapat kegiatan yang masuk dalam prioritas nasional yang mendukung program pemerintah, kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI

Kegiatan ini berkaitan dengan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, target kegiatan ini pada Balai KIPM Ambon tahun 2024 sebanyak 30 ruang lingkup produk, realisasi Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI pada tahun 2024 sebanyak 40 ruang lingkup produk.

2. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai, Kegiatan ini merupakan kegiatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan, target Pada Balai KIPM Ambon tahun 2024 sebanyak 19 dan terealisasi sebanyak 19.

3. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait, UPI yang telah dinyatakan mampu telusur dari hasil inspeksi penerapan sistem traceability diberikan Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability, target Balai KIPM Ambon sebanyak 6 surat keterangan realisasi tahun 2024 sebanyak 6 surat keterangan traceability.

4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada



setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Target UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 sebanyak 18 UPI, realisasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebanyak 17 UPI.

5. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi  
Melaksanakan Verifikasi Quality Assurance (Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya, target Verifikasi Quality Assurance tahun 2024 pada tahun 2024 sebanyak 2 lokasi kegiatan, realisasi pada tahun 2024 sebanyak 2 lokasi yakni pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.



H. Capaian Output Kegiatan

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

Periode : Desember satker : 649750

No	Satker	Nama Satker	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Validasi		
				Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini							
									RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO						TPCRO (%)	PCRO (%)
1	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10,000,000	0	0.00	1	Rekomendasi Kebijakan	1.00	-82.20	16.80	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	Non PN	-	00 - Data Valid
2	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	30,000,000	27,723,200	92.41	6	Lemba ga	0.00	-87.00	0.00	6.0000	6.00	100.00	7.59	00	Non PN	-	00 - Data Valid
3	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-	11,000,000	8,057,600	73.25	1	Produk	1.00	-90.66	8.34	1.0000	1.00	100.00	26.75	01	Non PN	-	00 - Data Valid





Laporan Keuangan Tahun 2024

5	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	23,336,000	23,323,899	99.95	20	produk	3.00	-40.00	0.05	20.0000	20.00	100.00	0.05	00	Non PN	-	00 - Data Valid
6	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	107,000,000	106,881,512	99.89	19	Lemba ga	8.00	-38.89	42.11	19.0000	19.00	100.00	0.11	00	Non PN	-	00 - Data Valid
7	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	18,000,000	13,946,800	77.48	6	Lemba ga	0.00	-94.00	0.00	6.0000	6.00	100.00	22.52	01	PN	-	00 - Data Valid
8	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100,000,000	97,767,917	97.77	18	Lemba ga	1.00	-76.00	6.00	18.0000	18.00	100.00	2.23	00	PN	-	00 - Data Valid
9	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan	18,000,000	17,934,800	99.64	1	Kegiat an	0.10	-79.00	0.36	1.0000	1.00	100.00	0.36	00	Non PN	-	00 - Data Valid



Laporan Keuangan Tahun 2024

		HASIL PERIKANAN AMBON	dan perikanan																
10	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan	85,000,000	83,184,200	97.86	1	Rekomendasi Kebijakan	1.00	-79.00	20.00	1.0000	1.00	100.00	2.14	00	Non PN	-	00 - Data Valid
11	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	9,000,000	0	0.00	1	Lemba ga	1.00	-79.00	20.00	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	Non PN	-	00 - Data Valid
12	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	22,500,000	22,337,800	99.28	1	Lemba ga	1.00	-79.00	0.72	1.0000	1.00	100.00	0.72	00	Non PN	-	00 - Data Valid
13	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan	9,000,000	8,587,000	95.41	2	Produk	2.00	-78.00	20.00	2.0000	2.00	100.00	4.59	00	Non PN	-	00 - Data Valid



Laporan Keuangan Tahun 2024

		AMBON	regulasi																	
14	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	21,770,000	21,308,000	97.88	1	Layanan	1.00	-90.66	3.50	1.0000	1.00	100.00	2.12	00	Non PN	-	00 - Data Valid	
15	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Layanan Data dan Informasi	8,242,000	8,216,799	99.69	1	Layanan	1.00	-90.66	8.34	1.0000	1.00	100.00	0.31	00	Non PN	-	00 - Data Valid	
16	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Layanan Perkantoran	4,687,292,000	4,672,487,280	99.68	1	Layanan	1.00	-90.66	8.34	1.0000	1.00	100.00	0.32	00	Non PN	-	00 - Data Valid	
17	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Layanan Manajemen SDM	22,898,000	22,896,300	99.99	30	Orang	5.00	-54.00	0.01	30.0000	30.00	100.00	0.01	00	Non PN	-	00 - Data Valid	



Laporan Keuangan Tahun 2024

18	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	166,864,000	166,760,119	99.94	1	Dokumen	1.00	-90.66	2.27	1.0000	1.00	100.00	0.06	00	Non PN	-	00 - Data Valid
----	--------	--	--------------------------------------	-------------	-------------	-------	---	---------	------	--------	------	--------	------	--------	------	----	--------	---	-----------------



Ambon, 6 Mei 2025  
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hattari Arisandi, S.St.Pi.,M.Si  
NIP. 19800527 200312 1 001

bkipm ambon

